



...

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

...

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BENGKALIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* terkait dan masyarakat Kabupaten Bengkalis, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis dan operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yang merupakan

penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas yang baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai, serta sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi strategis dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian. Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Pendekatan menggunakan pendekatan teknokratik dengan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan dan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 – 2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra yang berisikan uraian tentang analisis dan proyeksi perencanaan dan anggaran daerah dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis melalui proyeksi kinerja perencanaan daerah

menjadi tantangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dalam mendorong peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan daerah. Selanjutnya Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis menjadi pedoman dan perumusan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/ Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Bengkalis 2025-2045.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2025-2029.
32. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.
33. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 - 2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuan penyusunan Renstra sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan serta Program Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2025 – 2029 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis;

3. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
4. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis;
5. Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan, serta target kinerja tujuan;

sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran serta menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan, serta kelompok penerima manfaat serta mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, dinas ini memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas, fungsi, serta mekanisme kerja organisasi, sehingga setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat berlangsung secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan Perindustrian;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- 3) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas;
- 4) Pelaksanaan pembinaan terhadap UPT;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

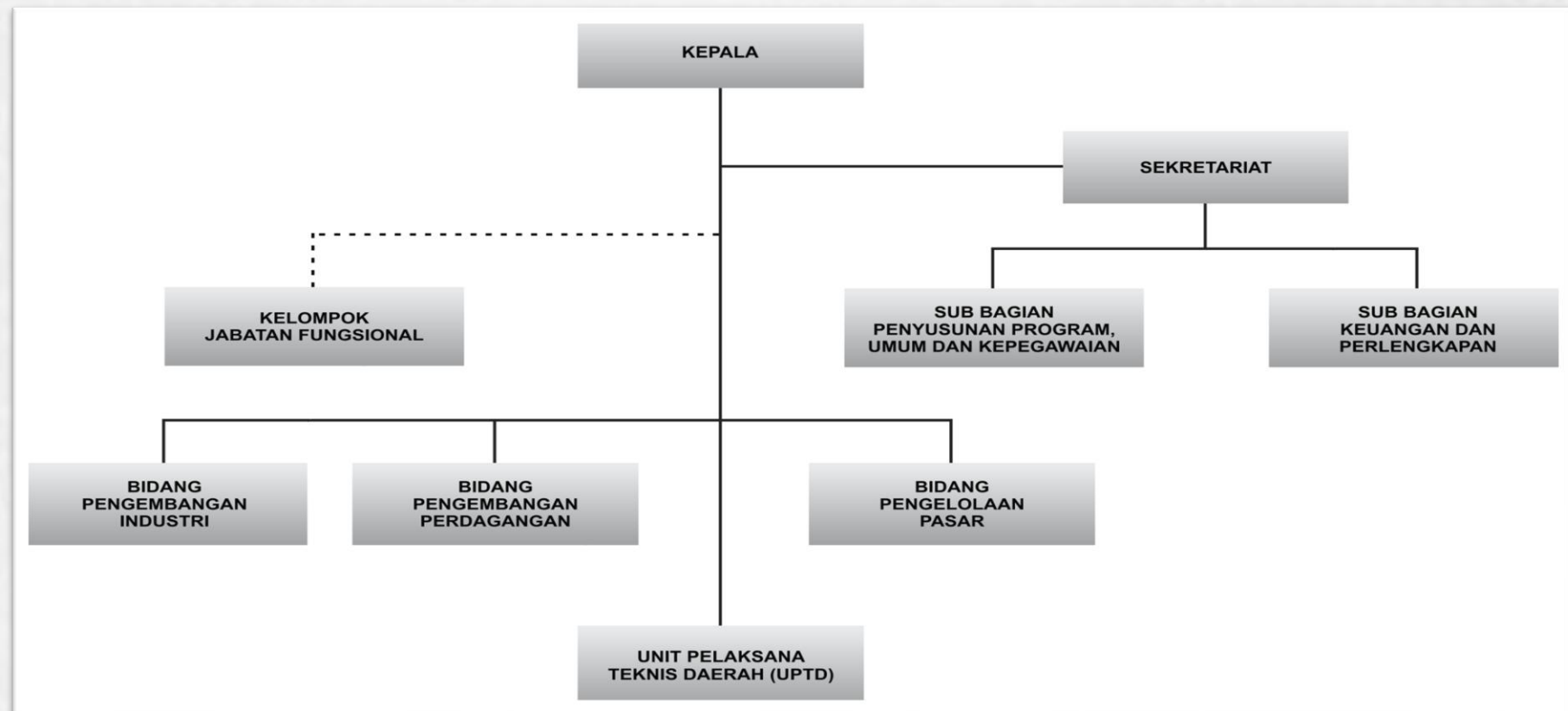
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memiliki tata kerja sebagai berikut :

- 1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- 2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif;
- 3) Hubungan kerja konsultatif untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang;
- 4) Hubungan kerja koordinatif dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar dari tumpang tindih dan

- duplikasi program kegiatan secara substansi serta menjamin keselarasan program dan kegiatan;
- 5) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya;
 - 6) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing;
 - 7) Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - 8) Pimpinan Satuan Organisasi memberikan penugasan kepada jabatan fungsional dan pelaksana;
 - 9) Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja;
 - 10) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dibentuk UPTD;
 - 11) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis



2.1.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per 31 Desember 2025, jumlah pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis adalah 53 orang Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan Pendidikan, ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	ASN		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	8	6	14
2.	Bidang Pengembangan Perdagangan	4	7	11
3.	Bidang Pengembangan Industri	2	6	8
4.	Bidang Pengelolaan Pasar	4	4	8
5.	UPT. Metrologi Legal	6	-	6
6.	UPT. PK-PIKM Kec. Bengkalis	1	-	1
7.	UPT. PK-PIKM Kec. Bantan	1	2	3
8.	UPT. PK-PIKM Kec. Mandau	-	4	4
9.	UPT. PK-PIKM Kec. Rupat	3	-	3
10.	UPT. PK-PIKM Kec. Rupat Utara	1	-	1
11.	UPT. PK-PIKM Kec. Siak Kecil	1	-	1
12.	UPT. PK-PIKM Kec. Bukit Batu	3	-	3
13.	UPT. PK-PIKM Kec. Pinggir	-	-	-
TOTAL		34	29	63

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berjumlah 63 orang, yang terdiri atas 34 orang laki-laki (53,96%) dan 29 orang Perempuan (46,03%), yang terdistribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kecamatan.

Tabel 2.2
Komposisi ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Gol. ASN					Jenis Kelamin		Jumlah
		I	II	III	IV	IX	L	P	
1.	Sekretariat	-	1	8	2	3	8	6	14
2.	Bidang Pengembangan Perdagangan	-	1	6	1	3	4	7	11
3.	Bidang Pengembangan Industri	-	2	5	-	1	2	6	8
4.	Bidang Pengelolaan Pasar	-	1	4	1	2	4	4	8
5.	UPT Metrologi Legal	-	2	3	-	1	6	-	6
6.	UPT. PK-PIKM Kec. Bengkalis	-	-	1	-	-	1	-	1
7.	UPT. PK-PIKM Kec. Bantan	-	2	1	-	-	1	2	3
8.	UPT. PK-PIKM Kec. Mandau	-	2	2	-	-	-	4	4
9.	UPT. PK-PIKM Kec. Rupert	-	2	1	-	-	3	-	3
10.	UPT. PK-PIKM Kec. Rupert Utara	-	-	1	-	-	1	-	1
11.	UPT. PK-PIKM Kec. Siak Kecil	-	-	1	-	-	1	-	1
12.	UPT. PK-PIKM Kec. Bukit Batu	-	1	2	-	-	3	-	3
13.	UPT. PK-PIKM Kec. Pinggir	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	14	35	4	10	34	29	63

Aparatur Sipil Negara sebagaimana tabel diatas pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Perdagangan, Bidang pengembangan Industri, Bidang Pengelolaan Pasar, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (PK-PIKM) yang tersebar di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Pinggir. Secara keseluruhan, komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis tahun 2025 golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 35 orang, golongan IV sebanyak 4 orang, dan golongan IX sebanyak 10 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara memiliki Tingkat jabatan dan pengalaman kerja yang tergolong menengah, sehingga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas perencanaan Pembangunan daerah secara optimal

Tabel 2.3
Komposisi ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Menurut Esselon

No.	Unit Kerja	Eselon			Jenis Kelamin	
		II	III	IV	Laki- laki	Perempuan
1.	Sekretariat	1	1	2	3	1
2.	Bidang Pengembangan Perdagangan	-	1	-	1	-
3.	Bidang Pengembangan Industri	-	1	-	-	1
4.	Bidang Pengelolaan Pasar	-	1	-	1	-
5.	UPT Metrologi Legal	-	-	1	1	-
6.	UPT. PK-PIKM Kec. Bengkalis	-	-	1	1	-
7.	UPT. PK-PIKM Kec. Bantan	-	-	1	-	1
8.	UPT. PK-PIKM Kec. Mandau	-	-	2	-	2
9.	UPT. PK-PIKM Kec. Rupert	-	-	1	1	-

No.	Unit Kerja	Eselon			Jenis Kelamin	
		II	III	IV	Laki- laki	Perempuan
10.	UPT. PK-PIKM Kec. Rupert Utara	-	-	1	1	-
11.	UPT. PK-PIKM Kec. Siak Kecil	-	-	1	1	-
12.	UPT. PK-PIKM Kec. Bukit Batu	-	-	1	1	-
13.	UPT. PK-PIKM Kec. Pinggir	-	-	-	-	-
TOTAL		1	4	11	11	5

Sebagaimana tabel diatas jumlah keseluruhan pegawai menurut eselon sebanyak 16 orang, dari jumlah tersebut, sebanyak 1 orang (12,5%) menduduki jabatan eselon II, 4 orang (62,5%) menduduki eselon III, dan 11 orang (25%) menduduki eselon IV. Secara keseluruhan, distribusi pejabat eselon Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sudah terpenuhi sedangkan terdapat kekosongan jabatan eselon IV pada UPT. PK-PIKM Kec. Pinggir.

Tabel 2.4
Komposisi ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal yang ditamatkan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1.	Sekretariat	5	1	5	3	14
2.	Bidang Pengembangan Perdagangan	3	1	5	2	11
3.	Bidang Pengembangan Industri	3	-	4	1	8
4.	Bidang Pengelolaan Pasar	1	-	6	1	8
5.	UPT Metrologi Legal	2	1	3	-	6
6.	UPT. PK-PIKM Kec. Bengkalis	-	-	1	-	1
7.	UPT. PK-PIKM Kec. Bantan	2	-	1	-	3
8.	UPT. PK-PIKM Kec.	2	-	2	-	4

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
	Mandau					
9.	UPT. PK-PIKM Kec. Rupert	2	-	1	-	3
10.	UPT. PK-PIKM Kec. Rupert Utara	-	-	1	-	1
11.	UPT. PK-PIKM Kec. Siak Kecil	-	-	1	-	1
12.	UPT. PK-PIKM Kec. Bukit Batu	1	-	2	-	3
13.	UPT. PK-PIKM Kec. Pinggir	-	-	-	-	-
JUMLAH		21	3	32	7	63

Berdasarkan tingkat pendidikan formal yang ditamatkan jumlah total Aparatur Sipil Negara 63 orang, pendidikan SMA berjumlah 21 orang (33,33%), D3 sebanyak 3 orang (4,76%), S1 sejumlah 32 orang (50,79%), dan Pendidikan S2 sebanyak 7 orang (11,11%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memiliki pendidikan sudah baik.

Tabel 2.5
Komposisi ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Menurut Usia

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jenis Kelamin		Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	Laki-laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	-	1	-	2	4	5	2	8	6	14
2.	Bidang Pengembangan Perdagangan	-	-	2	1	3	3	2	4	7	11
3.	Bidang Pengembangan Industri	-	1	1	-	5	1	-	2	6	8
4.	Bidang Pengelolaan Pasar	-	1	-	1	2	3	1	4	4	8
5.	UPT Metrologi Legal	-	-	2	1	2	1	-	6	-	6
6.	UPT. PK-PIKM Kec. Bengkalis	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jenis Kelamin		Jumlah
		20-25	26-30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	>50	Laki-laki	Perempuan	
7.	UPT. PK-PIKM Kec. Bantan	-	-	-	1	2	-	-	1	2	3
8.	UPT. PK-PIKM Kec. Mandau	-	-	-	-	3	1	-	-	4	4
9.	UPT. PK-PIKM Kec. Rupert	-	-	-	-	1	-	2	3	-	3
10.	UPT. PK-PIKM Kec. Rupert Utara	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
11.	UPT. PK-PIKM Kec. Siak Kecil	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
12.	UPT. PK-PIKM Kec. Bukit Batu	-	-	-	-	2	-	1	3	-	3
13.	UPT. PK-PIKM Kec. Pinggir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	3	6	6	24	16	8	34	29	63

Komposisi usia Aparatur Sipil Negara berdasarkan tabel diatas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis menurut usia dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada kelompok usia lebih dari 41-45 tahun sebanyak 24 orang (38,09) dari total pegawai.

Tabel 2.6
Komposisi ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Menurut Peta Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- laki	Perempuan	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	3	1	4
3.	Eselon IV	7	4	11
4.	Fungsional	7	9	16
5.	Pelaksana	16	15	31
Jumlah		34	29	63

Berdasarkan data jumlah Aparatur Sipil Negara pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bengkalis dengan total sebanyak 63 orang yang terdiri dari pejabat eselon 16 orang, pejabat fungsional 16 orang, dan pejabat pelaksana 31 orang. Ketersediaan jumlah aparatur sipil negara tersebut secara keseluruhan mencakupi kebutuhan sesuai beban kerja yang ada pada setiap unit kerja. Komposisi dan distribusi pegawai di tiap bidang juga menunjukkan proporsi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis secara optimal.

2.1.3 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong dan memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Daftar aset yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bengkalis

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Alat Angkutan					
	a. Kendaraan Roda 4	9	5	2	2	
	b. Kendaraan Roda 2	26	8	-	-	
2	Komputer pc	70	45	-	30	
3	Laptop	32	31	-	1	
4	Noote Book	8	8	-	-	
5	Mesin Penghitung Uang	1	1	-	-	
6	Printer	29	21	-	8	
7	Scaner	6	6	-	-	
8	Podium	1	1	-	-	

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
9	Microfon	2	2	-	-	
10	Meja Rapat	3	2	-	-	
11	Meja Tulis	167	111		56	
12	Kursi	191	126	-	75	
13	Iemari Besi	7	7	-	-	
14	Filling Kabinet	11	11			
15	AC 5 pk	1	1			
16	AC	41	21		20	
17	Kipas Angin	3	2	1	-	
18	Kamera	9	9	-	-	
19	Genset	1	-	-	1	
20	Televisi	10	2	2	6	
21	Kulkas	2	2	-	-	
22	Mesin Gerinda	2	2	-	-	
23	Mesin amplas Plat	2	2	-	-	
24	Mesin Pemotong Plat	2	2	-	-	
25	Mesin Bubut	1	1	-	-	
26	Wireless	5	-	-	5	
27	Telephone	10	-	-	-	
29	Bor	2	2	-	-	
30	Vacum	2	1	-	-	
31	Video Trone	1	1	-	-	
32	Mesin Penghancur Kertas	4	3	1		
33	Mesin Fhoto copy	2	-	2	-	
34	Mesin Pemotong Rumput	2	2	-	-	
35	CCTV	3	3	-	-	
JUMLAH		668	441	8	204	

Total aset yang dimiliki 668 unit Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 441 unit dalam kondisi baik (66,01%), aset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 8 unit (1,19%), sedangkan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 204 unit (30,53%). Kondisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana di Lingkungan Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis ditahun berikutnya.

2.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis terus menerus melakukan peningkatan pelayanan urusan Perdagangan dan Perindustrian dengan fokus pada perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2021-2024) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pertumbuhan IKM dengan indikator Persentase pertumbuhan IKM;
- b. Meningkatnya Kapasitas Usaha Perdagangan dengan indikator Jumlah jenis perdagangan hasil produk IKM;
- c. Menurunnya Tingkat Pelanggaran Distributor Barang Pokok Penting (BAPOKTING) dengan indikator Persentase penurunan pelanggaran distributor BAPOKTING.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	RENSTRA								
1.	Persentase Pertumbuhan IKM	20%	30%			25,2%	30%		
2.	Persentase Peningkatan perolehan Standarisasi IKM	55%	60%			57,18%	62%		
3.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi perdagangan	70%	75%			73%	75%		
4.	Persentase penurunan pelanggaran distributor BAPOKTING	35%	40%			35,24%	41%		
	PROTOTYPE								
1.	Persentase Pertumbuhan IKM			1,28%	1,31%			1,27%	1,25%
2.	Jumlah Jenis Perdagangan Hasil Poduk IKM			5 Produk	6 Produk			6 Produk	6 Produk
3.	Persentase Penurunan Pelanggaran Distributor BAPOKTING			8,33%	16,6%			12%	16,6%

Sumber : Lkip Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 dengan indikator Persentase Pertumbuhan IKM belum sesuai target, sedangkan indikator Jumlah Jenis Perdagangan Hasil Produk IKM dan Persentase Penurunan Pelanggaran Distributor BAPOKTING telah sesuai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis telah berjalan optimal sehingga diharapkan pada periode tahun berikutnya dapat

dilakukan upaya untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.

Dalam pelaksanaannya Pertumbuhan IKM ditemui beberapa permasalahan seperti kurangnya sarana dan prasarana penunjang bagi pelaku usaha IKM untuk mengembangkan usaha. Pertumbuhan industri di Kabupaten Bengkalis terhambat oleh beberapa faktor meliputi kondisi geografis menyebabkan biaya logistik tinggi dan akses transportasi, infrastruktur pendukung industri seperti jalan, energi, dan penetapan kawasan industri sehingga mengurangi minat investor. Struktur ekonomi daerah masih bergantung pada sektor primer tanpa hilirisasi, sehingga industri pengolahan kurang berkembang. Kualitas dan ketersediaan SDM terampil terbatas, sementara teknologi industri belum banyak diadopsi. Proses perizinan dan kepastian regulasi masih dianggap kurang efektif. Secara keseluruhan, kombinasi kendala geografis, kurangnya infrastruktur, keterbatasan SDM, rendahnya investasi, serta minimnya industrialisasi berbasis sumber daya lokal menjadi faktor utama yang memperlambat laju pertumbuhan industri di Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya permasalahan Perdagangan Hasil Poduk IKM dalam Produk ekspor Kabupaten Bengkalis menghadapi kendala yang menghambat peningkatan daya saing di pasar internasional, meliputi ketergantungan pada komoditas primer tanpa pengolahan, sehingga nilai tambah rendah dan rentan fluktuasi harga global. Selain itu, produk ekspor belum berkualitas dan sesuai standar menyebabkan sulitnya memenuhi persyaratan pasar luar negeri. Keterbatasan infrastruktur logistik dan ketersediaan Pelabuhan khusus, biaya distribusi yang tinggi, serta minimnya fasilitas pengolahan dan penyimpanan dingin mengurangi daya saing produk ekspor. Pelaku usaha juga menghadapi kendala permodalan, kurangnya informasi pasar, pemanfaatan teknologi dan lemahnya pendampingan ekspor, sehingga sebagian besar produsen belum siap memasuki pasar luar negeri.

Sementara permasalahan Pelanggaran Distributor BAPOKTING masih ditemukannya beberapa gudang yang belum memiliki izin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis melakukan pemantauan dan pengawasan gudang secara berkala, masih menghadapi berbagai kendala pengelolaan stok dan keamanan barang. Permasalahan utamanya keterbatasan SDM pengawas, minimnya penggunaan teknologi pengawasan, serta infrastruktur gudang belum memadai, terutama untuk penyimpanan produk yang memerlukan fasilitas khusus. Selain itu, sistem pencatatan yang masih banyak dilakukan secara manual menyebabkan data stok tidak akurat dan sulit diaudit serta masih adanya gudang yang beroperasi tanpa izin lengkap turut memperburuk efektivitas pengawasan. Faktor geografis juga menambah kompleksitas pengawasan karena distribusi barang lebih lambat dan risiko kerusakan dan kehilangan barang serta kurangnya kolaborasi antar instansi.

Faktor pendorong keberhasilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan dinas dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, terutama terkait penguatan Industri Kecil dan Menengah, pembinaan Pelaku Usaha IKM, dan stabilisasi perdagangan. Selain itu, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, seperti pasar, gudang, dan akses transportasi, menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi barang dan aktivitas industri. Keberhasilan juga didorong oleh kolaborasi yang baik dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah lainnya, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan manajemen perdagangan. Pemberdayaan SDM melalui pelatihan dan pendampingan usaha turut meningkatkan daya saing produk lokal. Di samping itu, dorongan pemerintah daerah dalam bentuk dukungan anggaran dan kebijakan memperkuat efektivitas program dinas.

Secara keseluruhan, keberhasilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bengkalis dalam meningkatkan ekonomi bergantung pada kombinasi kebijakan yang efektif, sinergi antar pihak, infrastruktur yang mendukung, kapasitas SDM yang meningkat, serta pemanfaatan teknologi dan pembiayaan, yang menciptakan lingkungan usaha serta lebih produktif dan kompetitif.

Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan dan perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memiliki ruang lingkup layanan yang mencakup fasilitasi, pembinaan, pengawasan, serta pengembangan sektor perdagangan dan industri. Jenis-jenis layanan yang perlu diselenggarakan dan dikembangkan meliputi :

a. Layanan Bidang Perdagangan

1. Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Rakyat

Meliputi pengelolaan pasar tradisional, revitalisasi sarana dan prasarana pasar, penataan pedagang, serta peningkatan kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar.

2. Fasilitasi Distribusi dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok

Termasuk pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok, pelaksanaan operasi pasar, serta koordinasi pengendalian inflasi daerah.

3. Pelayanan Informasi Perdagangan

Penyediaan data harga komoditas, peluang pasar, serta informasi ekspor dan impor, khususnya mengingat posisi strategis Kabupaten Bengkalis sebagai wilayah pesisir dan perbatasan.

4. Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen

Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), serta pembinaan pelaku usaha dalam menjamin mutu dan standar barang.

b. Layanan Bidang Perindustrian

1. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Fasilitasi legalitas usaha, pelatihan peningkatan kapasitas produksi, desain kemasan, standarisasi produk, serta akses pembiayaan.

2. Pengembangan Sentra Industri dan Kawasan Industri

Penguatan klaster industri unggulan daerah, seperti industri berbasis kelapa, sagu, perikanan, dan produk olahan hasil perkebunan.

3. Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar Produk Industri Lokal

Promosi produk unggulan daerah melalui pameran, marketplace digital, dan kerja sama antar daerah.

4. Layanan Sertifikasi dan Standarisasi Produk Industri

Pendampingan perolehan sertifikasi halal, PIRT, SNI, serta hak kekayaan intelektual.

Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan

Perkiraan kebutuhan pelayanan didasarkan pada kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, jumlah pelaku usaha, serta dinamika pertumbuhan ekonomi lokal.

1. Kebutuhan Pengelolaan Pasar Rakyat

Dengan sebaran pasar di setiap kecamatan, diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan minimal 1-2 pasar representatif per kecamatan, serta revitalisasi pasar eksisting yang belum memenuhi standar kelayakan.

2. Kebutuhan Pembinaan IKM

Mengingat dominasi usaha mikro dan kecil, kebutuhan layanan pembinaan diperkirakan mencakup ratusan pelaku IKM setiap tahun, baik dalam bentuk pelatihan teknis, manajemen usaha, maupun fasilitasi perizinan dan sertifikasi.

3. Kebutuhan Pengawasan Perdagangan

Dengan meningkatnya aktivitas distribusi barang, khususnya di wilayah pesisir dan perbatasan, diperlukan intensifikasi pengawasan barang beredar dan alat ukur di seluruh kecamatan secara berkala.

4. Kebutuhan Fasilitas Akses Pasar dan Digitalisasi

Transformasi digital menuntut pengembangan sistem informasi perdagangan berbasis daring serta pendampingan pemasaran digital bagi pelaku usaha lokal.

5. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Termasuk pembangunan gudang penyimpanan komoditas, rumah kemasan (*packaging house*), pusat promosi produk unggulan daerah, serta balai pelatihan industri.

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan

Arahan lokasi pengembangan pelayanan perlu mempertimbangkan pusat pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, serta aksesibilitas wilayah.

1. Wilayah Perkotaan (Kecamatan Bengkalis dan Mandau)

Difokuskan sebagai pusat perdagangan dan distribusi utama. Pengembangan diarahkan pada:

- Revitalisasi pasar rakyat skala besar
- Pusat promosi produk unggulan
- Layanan terpadu pembinaan IKM

2. Wilayah Perbatasan dan Pesisir (Rupat dan sekitarnya)

Difokuskan pada:

- Penguatan pengawasan barang beredar
- Fasilitas perdagangan lintas wilayah
- Pengembangan industri berbasis hasil laut

3. Wilayah Sentra Produksi Perkebunan dan Pertanian Difokuskan pada:
 - Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
 - Pendirian sentra IKM berbasis komoditas lokal
 - Penyediaan rumah kemasan dan gudang komoditas
4. Wilayah Kecamatan Berkembang
Diperlukan unit layanan pembinaan bergerak (*mobile service*) untuk menjangkau pelaku usaha di wilayah terpencil dan kepulauan.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Keuangan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis
Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2022	Rp.47.522.897.983	Rp.44.947.872.664	94,58
2	2023	Rp.43.663.920.519	Rp.40.343.873.484	92,40
3	2024	Rp.44.611.187.738	Rp.31.633.324.055	70,91
Jumlah		Rp.135.798.006.240	Rp.116.925.070.203	86,10

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2022 – 2024

Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir berada pada tingkat yang baik, yaitu 94,58%. Kinerja tersebut mencerminkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan realisasi anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan mendukung pencapaian prioritas perekonomian daerah. Selain itu, capaian ini juga menjadi

indikator keberhasilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat koordinasi internal antar bidang dan sinergi dengan perangkat daerah lainnya, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis secara menyeluruh.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan perindustrian secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan serta perindustrian, dinas ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada peningkatan daya saing produk dan ketertiban kegiatan perdagangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memiliki kelompok sasaran layanan utama meliputi :

1. Pelaku UMKM/IKM

Terutama usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri kecil/rumah tangga yang membutuhkan pembinaan, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan akses pemasaran.

2. Pengrajin dan Industri Berbasis Potensi Lokal

Kelompok usaha yang memanfaatkan bahan baku lokal dan berorientasi pada pengembangan produk khas daerah.

3. Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Industri pengolahan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian, khususnya di daerah penghasil kelapa sawit. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan devisa negara melalui ekspor produk kelapa sawit. Oleh karena itu, pengembangan industri

pengolahan kelapa sawit yang efisien dan berkelanjutan menjadi sangat penting agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat sekaligus tetap memperhatikan aspek lingkungan.

4. Koperasi dan Unit Usaha Desa/Kelurahan

Koperasi, khususnya yang berperan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di desa, menjadi target penguatan kelembagaan dan kapasitas usaha.

5. Pelaku Perdagangan dan Distribusi Barang Pokok

Termasuk pedagang pasar, distributor, dan pelaku usaha terkait logistik barang kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

6. Konsumen dan Masyarakat Umum

Melalui kegiatan pengawasan, perlindungan konsumen, penjaminan standar alat ukur/UTTP, dan stabilisasi harga.

Seluruh kelompok sasaran ini menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan sektor perdagangan dan industri yang maju, tertib, kompetitif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkalis.

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis tidak dapat bekerja secara sendiri. Peran kolaboratif atau kemitraan antar perangkat daerah menjadi kunci utama agar pembangunan sektor perdagangan, industri, dan ekonomi kreatif dapat berjalan optimal. Dua mitra strategis yang sangat berpengaruh dalam upaya ini adalah Dinas Koperasi serta Dinas Pariwisata.

Dinas Koperasi merupakan mitra penting karena berfungsi memperkuat pondasi ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan. Bentuk kolaborasi antara

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Dinas Koperasi meliputi:

- 1) Penguatan UMKM/IKM
 - Dinas Koperasi membina aspek kelembagaan dan organisasi usaha, sementara Disdagperin meningkatkan kualitas produksi, kemasan, sertifikasi, dan pemasaran produk.
 - Kolaborasi ini memastikan UMKM/IKM tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi usaha berdaya saing.
- 2) Fasilitasi Akses Permodalan
 - Dinas Koperasi menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga keuangan dan program pembiayaan koperasi/UMKM.
 - Disdagperin memastikan usaha tersebut memenuhi standar usaha, sehingga lebih layak mendapatkan permodalan.
- 3) Pengembangan Kelembagaan Ekonomi
 - Pembentukan koperasi pasar, koperasi produsen, dan koperasi IKM yang memperkuat rantai pasok perdagangan dan industri daerah.
 - Hal ini mendukung stabilitas distribusi barang dan efisiensi biaya produksi.
- 4) Pelatihan dan Pemberdayaan
 - Kedua dinas bekerja sama menyelenggarakan pelatihan manajemen, produksi, digital marketing, hingga kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

Dengan sinergi tersebut, sektor UMKM/IKM menjadi lebih kuat dan produktif sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan ekonomi Kabupaten Bengkalis.

Dinas Pariwisata adalah mitra strategis lain yang berperan dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan membuka pasar baru melalui sektor pariwisata daerah. Bentuk kerja sama antara Disdagperin dan Dinas Pariwisata antara lain:

- 1) Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Dinas Pariwisata mengelola potensi kreatif masyarakat dan destinasi wisata, sementara Disdagperin membina kualitas produk dan membuka akses pasar.
 - Kerja sama ini mencakup subsektor seperti kuliner, kriya, fesyen, dan seni lokal.
- 2) Pemasaran Produk Lokal di Destinasi Wisata
 - Produk IKM dan UMKM diarahkan untuk masuk ke pusat oleh-oleh, galeri wisata, dan event pariwisata.
 - Hal ini memperluas pasar sekaligus meningkatkan branding produk lokal Bengkalis.
- 3) Event Promosi Daerah
 - Kedua dinas bersama-sama mengadakan festival, pameran, dan expo untuk mempromosikan potensi wisata dan produk unggulan daerah.
 - Event tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen baru.
- 4) Pengembangan Desa Wisata Berbasis Produk Lokal
 - Desa wisata yang berkembang akan menciptakan peluang usaha baru seperti kuliner, kerajinan, dan jasa pariwisata.
 - Disdagperin memberikan pembinaan untuk memastikan usaha tersebut memenuhi standar kualitas dan siap dipasarkan.

Kemitraan ini menumbuhkan simbiosis positif antara sektor perdagangan, industri, dan pariwisata sehingga semakin memperkuat perekonomian daerah.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis menjalin Kerjasama antar perangkat daerah meliputi :

1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bengkalis

Kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dengan Bea Cukai berperan penting dalam memperkuat ekosistem perdagangan dan industri daerah, terutama dalam mendukung kelancaran kegiatan ekspor-impor serta pengawasan barang yang beredar. Melalui sinergi dalam fasilitasi ekspor UMKM/IKM, sosialisasi ketentuan kepabeanan, pendampingan perizinan, dan pengawasan barang kena cukai, kedua lembaga mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban perdagangan. Selain itu, kolaborasi dalam pemberantasan penyelundupan dan perlindungan pasar lokal turut menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Secara keseluruhan, kerja sama ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing produk lokal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis.

2) Kejaksaan Negeri Bengkalis

Kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dengan Kejaksaan bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek hukum, pengawasan, dan pembinaan pelaksanaan program dinas. Melalui pendampingan hukum, bantuan konsultasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan strategis, Kejaksaan membantu memastikan agar setiap program, pengadaan, dan kegiatan pelayanan publik di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi ini juga berperan dalam pencegahan potensi penyimpangan, penyelesaian permasalahan hukum, serta memberikan kepastian hukum

bagi pelaku usaha dan masyarakat. Secara keseluruhan, kerja sama tersebut mendukung terciptanya lingkungan perdagangan dan industri yang lebih transparan, akuntabel, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah

3) Kepolisian Republik Indonesia Resort Bengkalis

Kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dengan Kepolisian Resor merupakan bentuk sinergi dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran aktivitas perdagangan dan perindustrian di daerah. Melalui koordinasi dalam pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, penertiban praktik perdagangan ilegal, serta perlindungan konsumen dan pelaku usaha, Polres membantu memastikan stabilitas pasar dan mencegah gangguan keamanan yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pendampingan kepolisian dalam kegiatan operasi pasar, pengawasan SPBU, serta penindakan pelanggaran di sektor perdagangan turut memperkuat fungsi Disdagperin dalam menciptakan lingkungan usaha yang aman, tertib, dan terpercaya. Secara keseluruhan, kerja sama ini berkontribusi signifikan terhadap terciptanya iklim perdagangan dan industri yang kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

Kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dan Dinas PUPR merupakan kolaborasi strategis yang berfokus pada penyediaan serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung kegiatan perdagangan dan perindustrian daerah. Melalui pembangunan dan revitalisasi pasar, perbaikan sarana distribusi seperti jalan dan akses logistik, serta penyediaan fasilitas sentra IKM yang memadai,

Dinas PUPR membantu mewujudkan lingkungan usaha yang lebih layak, aman, dan produktif. Sinergi ini memungkinkan Disdagperin untuk memperkuat sektor perdagangan dan industri melalui infrastruktur yang terencana dan berkualitas. Secara keseluruhan, kerja sama tersebut berperan penting dalam meningkatkan kelancaran arus barang, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan.

5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis

Kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dengan Satpol PP berperan penting dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum dalam aktivitas perdagangan dan perindustrian. Melalui penertiban pedagang kaki lima, pengawasan ketertiban di pasar, penegakan aturan perizinan usaha, serta pengendalian penggunaan fasilitas publik untuk kegiatan perdagangan, Satpol PP membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas perdagangan berjalan sesuai ketentuan. Sinergi ini juga mendukung terciptanya lingkungan pasar yang tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Secara keseluruhan, kerja sama ini memperkuat fungsi Disdagperin dalam mengelola sektor perdagangan dan perindustrian secara lebih efektif serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

6) Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bengkalis

Kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) merupakan bentuk sinergi strategis dalam memperkuat peran dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi dalam pembinaan pelaku

usaha, fasilitasi investasi, pengembangan jejaring bisnis, serta promosi produk unggulan daerah, KADIN membantu memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri. Disdagperin dan KADIN juga bekerja sama dalam memfasilitasi pelatihan kewirausahaan, forum bisnis, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan usaha lokal. Secara keseluruhan, kemitraan ini memperkuat ekosistem usaha yang produktif dan kompetitif serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

7) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dengan Bagian Perekonomian merupakan bentuk sinergi dalam mendukung stabilitas dan penguatan perekonomian daerah. Melalui koordinasi dalam penyediaan dan analisis data ekonomi, pengawasan harga barang kebutuhan pokok, serta pelaksanaan operasi pasar, kolaborasi ini membantu pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga. Selain itu, kerja sama dalam perumusan kebijakan ekonomi daerah turut memperkuat perencanaan program perdagangan dan industri agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika pasar. Secara keseluruhan, kemitraan ini berkontribusi pada terciptanya pengelolaan ekonomi daerah yang lebih terukur, efektif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

8) Politeknik Negeri Bengkalis

Kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dengan perguruan tinggi menjadi upaya

strategis dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pembangunan sektor perdagangan dan industri daerah. Melalui kolaborasi dalam penelitian, kajian akademik, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, perguruan tinggi memberikan dukungan keilmuan dan inovasi yang dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis data. Secara keseluruhan, kerja sama dengan perguruan tinggi memperkuat kualitas perencanaan, inovasi sektor industri dan perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan.

9) Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian Provinsi Sumatra Utara

Kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian Provinsi Sumatra Utara merupakan kolaborasi strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing sektor industri daerah. Melalui pendampingan teknis, pelatihan peningkatan kompetensi SDM industri, bimbingan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta dukungan dalam pengembangan teknologi dan inovasi produk, Balai Industri membantu memperkuat kapasitas IKM dalam menghadapi persaingan pasar. Sinergi ini juga mencakup fasilitasi sertifikasi, uji laboratorium, dan pengembangan sentra IKM agar mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan memenuhi standar. Secara keseluruhan, kerja sama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan struktur industri daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis secara lebih berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah mencerminkan tantangan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penyelesaian permasalahan dan penanganan isu strategis ini menjadi fondasi penting bagi perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang efektif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Adapun permasalahan pelayanan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis meliputi :

- 1) Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah;
- 2) Masih rendahnya daya saing Industri Kecil Menengah (IKM);
- 3) Belum optimalnya peningkatan investasi daerah;
- 4) Ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor migas menjadikan perekonomian Bengkalis rentan terhadap gejolak ekonomi dunia dan menghambat perkembangan ekonomi daerah;

Tabel 2.10
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah dalam Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

MASALAH POKOK/UTAMA	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah	Struktur ekonomi sangat bergantung pada pendapatan minyak dan gas, sehingga kontribusi sektor non migas masih kecil	Infrastruktur yang belum kuat, investasi rendah, SDM kurang memadai, dan potensi lokal belum terolah

MASALAH POKOK/UTAMA	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Masih rendahnya daya saing Industri Kecil Menengah (IKM)	Produk daerah yang belum mempunyai kualitas yang tinggi, serta pemasaran yang terbatas	Ekosistem industri yang belum terbentuk, biaya logistik tinggi, minimnya informasi dan teknologi, serta literasi digital yang masih rendah
Belum optimalnya peningkatan investasi daerah	Minimnya investasi yang masuk, Infrastruktur yang belum merata dan promosi investasi kurang aktif	Struktur ekonomi yang bergantung pada migas, tata ruang dan lahan belum tertata dengan baik, minimnya data investasi serta kapasitas pelayanan investasi yang belum maksimal
Ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor migas menjadikan perekonomian Bengkalis rentan terhadap gejolak ekonomi dunia dan menghambat perkembangan ekonomi daerah	Ketergantungan tinggi pada struktur migas	Kurangnya hilirisasi sektor alternatif, minimnya investasi non migas dan ketergantungan fiskal pada DBH migas

2.2.2 Isu Strategis

Adapun Isu Strategis pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis meliputi :

- 1) Sebagian besar komoditi ekspor adalah komoditi migas dan minyak nabati;
- 2) Belum optimalnya dukungan sertifikasi produk lokal dan masih rendahnya daya saing produk lokal berkualitas ekspor;
- 3) Belum optimalnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan);
- 4) Belum optimalnya persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan;

- 5) Belum optimalnya dukungan pada pengembangan industri lokal berbasis sumber daya lokal dan masih lemahnya integrasi hulu hilir dalam pengembangan industr;
- 6) Pengembangan industri pertanian masih terkonsentrasi pada komoditi perkebunan;
- 7) Masih belum optimalnya dukungan pada pengembangan pengolahan hasilhasil pertanian, perkebunan dan perikanan berbasis Masyarakat;
- 8) Belum optimalnya pertumbuhan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- 9) Belum optimalnya Persentase pelaku usaha IKM yang di fasilitasi izin produknya;

Kesimpulan hasil identifikasi masalah serta perumusan isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sudah tersedianya dokumen RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045	- Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah - Masih rendahnya daya saing Koperasi, - Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Belum optimalnya peningkatan investasi daerah Ketergantungan perekonomian daerah terhadap	Belum Optimalnya Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Masyarakat yang Mendukung Industri Menengah dan Besar	- Ketegangan geopolitik global dan dampaknya terhadap stabilitas regional dan harga komoditas - Risiko resesi global, inflasi, dan tekanan nilai tukar akibat fluktuasi suku bunga global. - Kebijakan Proteksionis Perdagangan Global yang Menurunkan Daya Saing Ekspor - Ketidakpastian Pasar Komoditas Global dan Kebutuhan Diversifikasi Ekonomi	- Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. - Pembangunan yang berkelanjutan mensyaratkan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang selaras dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. - Ruang fiskal Indonesia saat ini relatif terbatas di	- Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah - Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan Perluasan akses Kesempatan Kerja yang responsif gender - Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal	- Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan - Masih belum stabilnya peningkatan jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkalis - Masih rendahnya persentase koperasi aktif - Masih rendahnya daya saing UMKM - Sebagian besar komoditi ekspor adalah komoditi migas dan minyak nabati. - Belum optimalnya dukungan sertifikasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	sektor migas menjadikan perekonomian Bengkalis rentan terhadap gejolak ekonomi dunia dan menghambat perkembangan ekonomi daerah		Daerah 5. Krisis Energi Global dan Perlunya Transisi Menuju Energi Terbarukan 6. Perkembangan Teknologi dan Kecerdasan Buatan sebagai Peluang Transformasi Ekonomi Daerah	tengah upaya Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju. Hal tersebut tecermin dari indikator penerimaan perpajakan Indonesia yang terus menurun secara historis.	4. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat,berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	produk lokal dan masih rendahnya daya saing produk lokal berkualitas ekspor 7. Belum optimalnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan) 8. Belum optimalnya presentase pengaduan konsumen yang terselesaikan 9. Belum optimalnya dukungan pada pengembangan industri lokal berbasis sumber daya lokal dan masih lemahnya integrasi hulu hilir dalam pengembangan industri

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						10. Belum optimalnya pertumbuhan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) 11. Belum optimalnya Persentase pelaku usaha IKM yang di fasilitasi izin produknya

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan perencanaan daerah dengan tujuan yaitu “Terwujudnya Perekonomian Masyarakat yang Kokoh dan Berkeadilan”.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yaitu:

- 1) Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan dengan indikator Persentase Peningkatan Sektor Industri Pengolahan Manufaktur;
- 2) Meningkatkan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan indikator PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;
- 3) Meningkatkan Ekspor Barang/Jasa dengan indikator Persentase Ekspor Barang dan Jasa (PDRB);
- 4) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang akuntabel dan Berbasis Risiko dengan indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah.

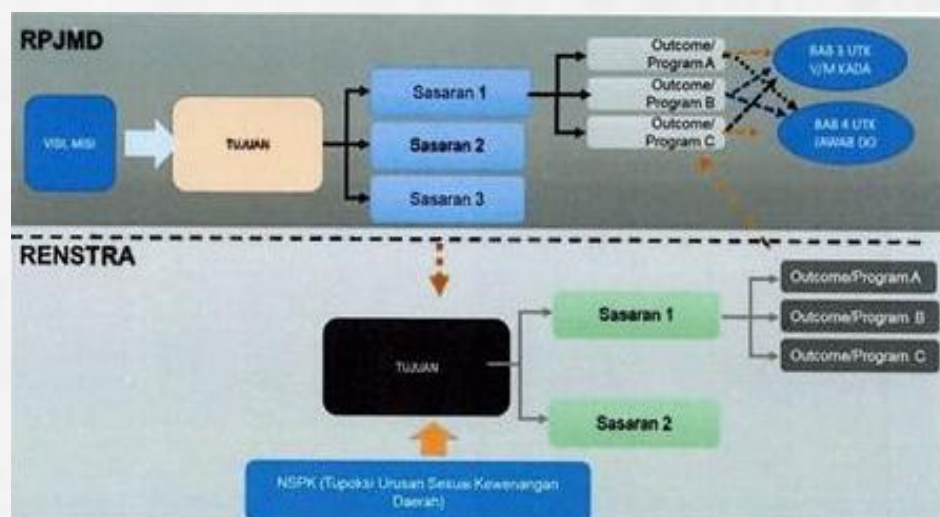
Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, siklus perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Proses dimulai dari identifikasi sasaran RPJMD yang berfungsi sebagai arahan makro pembangunan daerah. Sasaran ini kemudian diturunkan secara bertahap (cascading) menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan ini disinergikan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta arah kebijakan RPJMD untuk menghasilkan arah kebijakan perangkat daerah. Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam strategi yang mencakup tahapan, fokus, dan program atau kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah. Strategi ini mempertimbangkan isu strategis seperti masalah, potensi, dan lingkungan dinamis. Hasil akhir dari proses ini adalah output dan outcome yang menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

Siklus perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Proses dimulai dari identifikasi sasaran RPJMD yang berfungsi sebagai arahan makro pembangunan daerah. Sasaran ini kemudian diturunkan secara bertahap (cascading) menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan ini disinergikan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta arah kebijakan RPJMD untuk menghasilkan arah kebijakan perangkat daerah. Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam strategi yang mencakup tahapan, fokus, dan program atau kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah. Strategi ini mempertimbangkan isu strategis seperti masalah, potensi, dan lingkungan dinamis. Hasil akhir dari proses ini adalah output dan outcome yang menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah (PD). Proses ini diawali dari visi dan misi kepala daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan RPJMD. Tujuan ini selanjutnya diturunkan menjadi beberapa sasaran strategis RPJMD yang bersifat makro dan menjadi acuan utama dalam pembangunan daerah. Setiap sasaran RPJMD menghasilkan berbagai outcome yang berasal dari pelaksanaan program-program pembangunan serta digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah seperti dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi SAKIP.

Pada sisi Renstra PD, tujuan perangkat daerah disusun dengan mengacu pada sasaran RPJMD yang relevan serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi (tupoksi) berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Dari tujuan Renstra PD kemudian diturunkan sasaran perangkat daerah yang terintegrasi dengan sasaran RPJMD, menunjukkan adanya sinergi antara perencanaan makro (RPJMD) dan perencanaan sektoral (Renstra PD). Sasaran-sasaran ini selanjutnya menghasilkan outcome yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian program-program RPJMD. Dengan demikian, gambar ini menunjukkan pentingnya penyelarasan antara dokumen perencanaan daerah agar terwujud integrasi, sinkronisasi, dan efektivitas dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan pemaparan dari dua gambar diatas hubungan yang saling melengkapi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah yang terpadu. Gambar 3.1 menekankan proses penyusunan Renstra PD yang dimulai dari sasaran dan arah kebijakan RPJMD, serta pengaruh dari NSPK sebagai panduan teknis dalam penyusunan strategi dan program kerja perangkat daerah. Proses ini bersifat "cascading", yaitu penjabaran secara bertahap dari tujuan hingga strategi dan program, dengan mempertimbangkan isu strategis yang bersumber dari

masalah, potensi, dan dinamika lingkungan. Setiap elemen dalam siklus ini berkontribusi terhadap pencapaian output dan outcome yang mendukung sasaran RPJMD secara keseluruhan.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dan tujuan Renstra PD melalui jalur integrasi vertikal yang dimulai dari visi-misi kepala daerah. Sasaran RPJMD menjadi rujukan utama dalam merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang pada akhirnya akan menghasilkan outcome dari pelaksanaan program-program pembangunan. Keterhubungan ini menunjukkan bahwa Renstra PD harus disusun berdasarkan sasaran RPJMD dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah melalui acuan NSPK. Dengan demikian, kedua gambar tersebut secara komplementer menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan akuntabel memerlukan kesinambungan dan keselarasan antara RPJMD dan Renstra PD, baik dari sisi substansi kebijakan maupun implementasi teknisnya.

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dirumuskan Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA”

Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna yang mendalam sekaligus harapan besar bagi Kabupaten Bengkalis untuk tumbuh sebagai daerah yang bermarwah, maju, sejahtera, serta memiliki daya saing serta unggul di Indonesia. Penjelasan Visi sebagai berikut:

- a. Bermarwah, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan;

- b. Maju, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Semua Kebutuhan Baik Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemanfaatan Teknologi, ditandai dengan Tingginya Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Kompetitif serta Masyarakat yang lebih Mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
- c. Sejahtera, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar sebagai Wujud dari Pembangunan yang Adil dan Merata dan menyentuh semua Aspek Kehidupan yang ditandai dengan Tingkat Pendapatan yang Cukup, Rendahnya Angka Kemiskinan, Rendahnya Tingkat Kriminal serta Tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang sangat baik;
- d. Unggul, Bermakna: Suatu kondisi tercapainya semua indikator pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun non fisik, berprestasi dan berinovasi serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing;
- 2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter;
- 3) Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Untuk mengoperasionalkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi elemen kunci dalam arsitektur perencanaan pembangunan jangka menengah.

Tujuan menggambarkan dampak (impact) dari berbagai program dan kegiatan prioritas, yang menunjukkan tingkat pencapaian visi secara keseluruhan. Dalam konteks perencanaan daerah, tujuan memiliki fungsi strategis sebagai simpul utama dalam arsitektur kinerja pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator kinerja, arah kebijakan, strategi dan program prioritas. Oleh karena itu, perumusan tujuan menjadi bagian penting dalam perencanaan kebijakan (policy planning), karena menentukan arah perubahan yang ingin diwujudkan di berbagai bidang pembangunan. Setiap tujuan harus memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely), sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan dievaluasi secara objektif. Sebagai turunan langsung dari tujuan, sasaran pembangunan dirumuskan untuk menggambarkan hasil antara (intermediate outcomes) yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perumusan sasaran dilakukan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan Bengkalis yang bermarwah, maju, sejahtera, dan unggul, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah merumuskan tiga tujuan utama pembangunan jangka menengah yang menjadi arah strategis dalam periode tahun 2025–2029.

Ketiga tujuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan

pengelolaan sumber daya alam secara optimal; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis, serta membentuk masyarakat berkarakter melalui penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu; serta meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dengan mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan. Sebagai turunan dari ketiga tujuan tersebut, telah ditetapkan 20 sasaran pembangunan yang disusun secara spesifik, terukur, dan relevan terhadap permasalahan serta potensi daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD Tahun 2025-2029 maka dukungan utama yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis untuk berperan menunjang Misi ke-1 Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.

Sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan perdagangan dan perindustrian maka dirumuskan Tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis untuk Renstra Tahun 2025-2029 adalah: "Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan" dengan indikator kinerja "Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan". Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis untuk Renstra Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan dengan indikator Persentase Peningkatan Sektor Industri Pengolahan (manufaktur), Meningkatkan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan indikator PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Meningkatnya Ekspor Barang/Jasa dengan indikator Persentase Ekspor Barang dan Jasa (PDRB).

Dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a) Persentase pertumbuhan IKM;
- b) Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan;
- c) Persentase penyediaan sarana Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini melalui SIINas;
- d) Persentase peningkatan pendaftaran perusahaan perdagangan besar, menengah dan kecil;
- e) Persentase Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD;
- f) Persentase stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- g) Persentase pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan labelisasi.;
- h) Persentase peningkatan volume dan nilai penjualan produk dalam negeri di pasar domestik maupun ekspor;
- i) Persentase Nilai ekspor produk unggulan daerah;
- j) Persentase tata kelola pemerintahan daerah.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 beserta Indikator dan Target Kinerjanya untuk 5 (lima) Tahun kedepan disajikan pada Tabel. 3.1. berikut (Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah).

Tabel 3.1
Hasil Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia								
Misi ke-1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing								
NSPK (Sasaran RPJMD yang Relevan)	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan Pengelolaan SDA								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan		Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	-	16,18	16,42	16,64	16,83	17	17,14
	Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Sektor Industri Pengolahan (manufaktur)	-	6,25	6,88	7,56	8,32	9,15	10,07
	Meningkatkan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	-	1,05	1,16	1,27	1,40	1,54	1,69
	Meningkatnya Ekspor Barang/Jasa	Persentase Ekspor Barang dan Jasa (PDRB)	-	2,06	2,27	2,49	2,74	3,02	3,32
	Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang akuntabel dan Berbasis Resiko	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	-	BB	A	A	A	A	A

Indikator tujuan dan sasaran pada Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Bengkalis, terlihat bahwa pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang kokoh, berkeadilan, dan berdaya saing melalui penguatan sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, peningkatan ekspor, serta tata kelola organisasi yang semakin akuntabel. Setiap indikator menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2025 hingga 2030, menandakan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat struktur ekonomi melalui sektor-sektor strategis.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memiliki fungsi penting sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan operasional, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, serta pengembangan sektor perdagangan dan industri. Pada bidang perindustrian, diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja industri pengolahan melalui pembinaan IKM, penyediaan sarana prasarana industri, penumbuhan sentra industri, serta peningkatan kemampuan teknologi dan kualitas produk. Sementara itu, pada bidang perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berperan dalam meningkatkan aktivitas perdagangan besar dan eceran melalui stabilisasi harga dan ketersediaan barang, pembinaan pelaku usaha ritel, penyediaan fasilitas distribusi perdagangan, dan penguatan sistem perdagangan yang kompetitif.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berperan langsung dalam mendorong peningkatan Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kapasitas IKM, peningkatan kualitas produk, bantuan peralatan dan

teknologi, pengembangan sentra industri, serta perluasan akses pasar.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis juga berperan dalam mendorong peningkatan Persentase Ekspor Barang dan Jasa, melalui fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah, sertifikasi mutu dan standar, pelatihan ekspor, serta peningkatan kemitraan dengan dunia usaha untuk memperluas jaringan pemasaran ke tingkat nasional dan internasional. Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis mendukung peningkatan predikat SAKIP perangkat daerah menuju kategori A melalui penguatan perencanaan, akuntabilitas kinerja, pengendalian program, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan pelaporan. Secara keseluruhan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian seluruh indikator sasaran dalam RPJMD sehingga menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis.

Sistematika dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah dengan mengacu pada NSPK serta selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis. Dalam tabel ini, fokus perencanaan diarahkan pada upaya meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui penguatan kualitas sumber daya manusia serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran yang lebih operasional, khususnya pada bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.

Indikator-indikator kinerja yang disusun untuk menggambarkan arah strategis pembangunan ekonomi daerah.

Rasio PDRB sektor industri pengolahan, persentase peningkatan sektor industri manufaktur, PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, serta persentase ekspor barang dan jasa merupakan indikator utama yang menunjukkan penguatan struktur ekonomi daerah. Setiap indikator dilengkapi target tahunan yang meningkat secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030, sehingga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memacu pertumbuhan sektor industri dan perdagangan secara konsisten.

Selain indikator ekonomi, tabel ini juga memuat sasaran peningkatan tata kelola organisasi melalui perbaikan akuntabilitas perangkat daerah yang ditunjukkan dengan target predikat SAKIP. Penetapan predikat SAKIP dari BB menuju A menunjukkan adanya upaya penguatan akuntabilitas kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta perbaikan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perencanaan strategis perangkat daerah menjadi lebih terarah, fokus, dan akuntabel. Indikator tersebut bukan hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memastikan keterpaduan antara tujuan pembangunan makro dalam RPJMD dengan implementasi teknis di perangkat daerah. Pendekatan yang berbasis target tahunan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau progres secara sistematis, mengidentifikasi hambatan lebih dini, dan memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja sektor industri, perdagangan, ekspor, dan tata kelola organisasi.

Struktur dalam tabel ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen kuat untuk membangun perekonomian daerah yang semakin kokoh, berkeadilan, dan berdaya saing, sehingga mendukung pencapaian visi Kabupaten Bengkalis.

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Dan Strategi Renstra PD

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan	Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan	Penguatan perekonomian masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui optimalisasi potensi daerah serta pemerataan akses ekonomi	Melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor perdagangan dan perindustrian melalui penguatan IKM, pengembangan pasar, dan transformasi layanan untuk mendorong swasembada ekonomi daerah.
				Melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi dalam mendukung terwujudnya sektor perdagangan dan perindustrian yang maju, modern, inklusif, berdaya saing.
			Peningkatan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam melalui pengolahan industri agar daerah tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah	Melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi dalam mendukung peningkatan daya saing sektor perdagangan dan industri melalui peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, digitalisasi pemasaran dan pemerataan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi wilayah.

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pembangunan Infrastruktur kawasan industri untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi	Melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi dalam mendukung peningkatan kemandirian pelaku IKM melalui penguatan ekonomi kreatif, pengembangan desa industri, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan inovatif. Melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi dalam mendukung penguatan keunggulan daerah melalui pengembangan industri unggulan daerah, optimalisasi rantai pasok, perluasan jejaring perdagangan serta perbaikan ekosistem usaha menuju percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam rangka mengoperasionalkan tujuan untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan, sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis difokuskan dalam meningkatkan Sektor Industri Pengolahan. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah yang lebih operasional dan kontekstual sesuai kondisi faktual di lapangan.

Pertama, dilakukan penguatan perekonomian masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui optimalisasi potensi daerah serta pemerataan akses ekonomi.

Kedua, diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam melalui pengolahan industri agar daerah tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.

Ketiga, dilakukan peningkatan pembangunan Infrastruktur kawasan industri untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.

Dalam mewujudkan perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis melakukan upaya peningkatan sektor industri pengolahan yang dirumuskan dalam arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah melalui penguatan ekonomi lokal, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur pendukung industri, kebijakan yang disusun dalam Renstra diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri, berdaya saing, dan merata bagi seluruh masyarakat.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD



Pada tahap pertama, arah pembangunan difokuskan pada penguatan pondasi sektor perdagangan dan perindustrian melalui peningkatan produktivitas pelaku usaha serta pembenahan tata kelola layanan. Kegiatan diarahkan pada pembinaan IKM dasar, penataan pasar rakyat, pendataan sentra usaha, serta penguatan perizinan dan legalitas usaha. Upaya ini bertujuan menciptakan kondisi awal yang solid sebagai dasar bagi peningkatan daya saing usaha kecil maupun menengah. Pada tahap ini, koordinasi lintas perangkat daerah, asistensi teknis, serta monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi prioritas agar seluruh proses penguatan pondasi berjalan terarah dan konsisten dengan kebijakan daerah dan RPJMD.

Pada tahap kedua, fokus diarahkan pada peningkatan daya saing pelaku perdagangan dan industri melalui perbaikan kualitas SDM, reformasi birokrasi, serta digitalisasi layanan. Pengembangan

kapasitas pelaku usaha dilakukan melalui pelatihan kompetensi, sertifikasi keahlian, serta pembinaan manajemen usaha modern. Di sisi lain, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis meningkatkan tata kelola layanan berbasis digital untuk mendukung efisiensi dan transparansi, termasuk digitalisasi sistem informasi pasar, layanan perizinan, dan database pelaku usaha. Dalam tahap ini, pertumbuhan wilayah ekonomi juga didorong melalui penguatan pusat-pusat perdagangan lokal. Langkah ini mempercepat transformasi sektor perdagangan dan industri menuju struktur ekonomi yang semakin kompetitif.

Tahap ketiga berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan desa industri, pengembangan IKM berbasis potensi lokal, serta akselerasi ekonomi kreatif. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memberikan fasilitasi peningkatan mutu produk seperti sertifikasi halal, SNI, dan HKI untuk mendorong produk lokal memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar. Upaya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat rantai nilai lokal. Selain itu, ekonomi kreatif menjadi salah satu prioritas, terutama subsektor yang relevan seperti kuliner, kriya, dan fesyen. Tahap ini ditujukan untuk memperkokoh pondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui usaha yang mandiri, inovatif, dan berorientasi pasar.

Pada tahap keempat, fokus pengembangan difokuskan pada penguatan keunggulan daerah dengan memaksimalkan potensi sektor perdagangan dan industri yang menjadi unggulan Kabupaten Bengkalis. Strategi diarahkan pada penguatan rantai pasok komoditas strategis, pengembangan industri bernilai tambah tinggi, serta peningkatan promosi dagang pada level regional maupun nasional. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis mengintensifkan kerja sama dengan BUMN, BUMD,



perguruan tinggi, dan pelaku usaha besar untuk memperkuat akses pasar, teknologi, dan pembiayaan. Tahap ini menjadi momentum percepatan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri sebagai penopang pembangunan daerah yang kompetitif dan berkelanjutan.

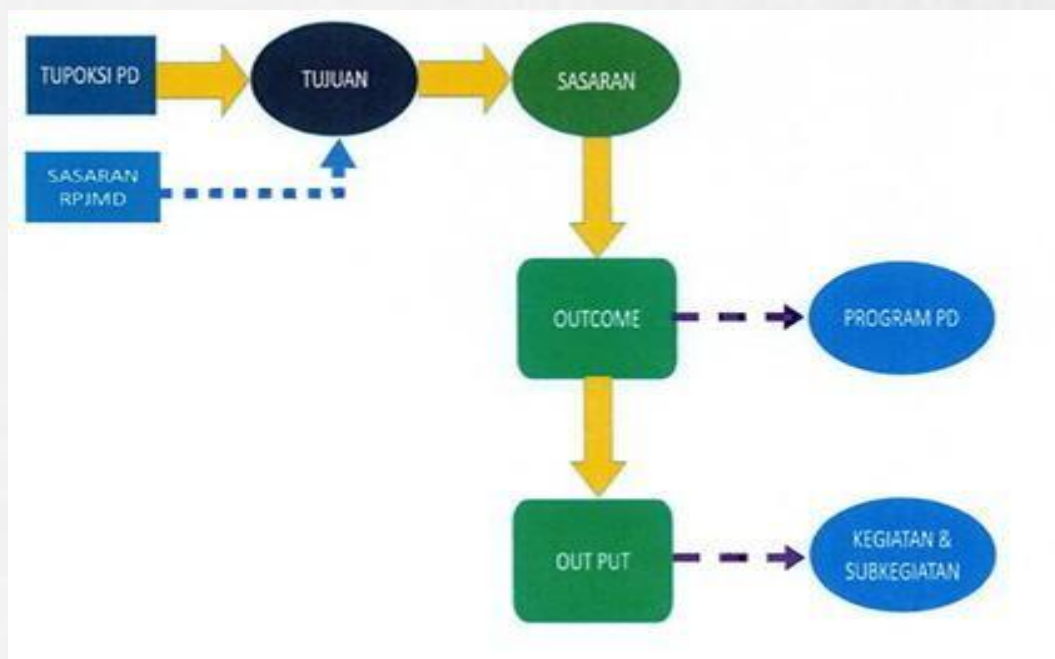
Tahap terakhir merupakan fase konsolidasi terhadap seluruh capaian pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian selama periode 2026–2029. Fokus diarahkan pada penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas ekosistem usaha, dan evaluasi menyeluruh terhadap target Renstra. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memperkuat model layanan yang modern, inovatif, dan ramah pelaku usaha untuk memastikan keberlanjutan pembangunan sektor perdagangan dan industri di masa mendatang. Pada tahap ini, kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB daerah ditingkatkan melalui strategi hilirisasi, inovasi produk, serta perluasan jaringan pemasaran. Seluruh capaian pada tahap ini diharapkan mampu mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, Sejahtera, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian

output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala sub bidang/kepala sub bagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses). Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 direncanakan pada periode renstra tahun 2025-2029, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - h. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan/Material
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- d. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

- 1) Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - a. Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gedung
- 2) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
 - a. Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik
- 3) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan dan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
 - b. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
- Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
- 4) Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

- 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - c. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- 2) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - b. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - c. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- 3) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
 - b. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - c. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

4. Program Pengembangan Ekspor

- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pameran Dagang Nasional
 - b. Pameran Dagang Lokal
 - c. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
 - d. Peningkatan Citra Produk Ekspor

5. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen

- 1) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
 - c. Penyidikan Metrologi Legal

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- 1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat diwilayah kerjanya
 - a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

8. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

- 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - f. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
 - g. Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - h. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) dilevel Kabupaten/Kota
 - i. Penayediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - j. Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri

9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

- 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- 1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - b. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Tabel 4.2 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan Pengelolaan SDA	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan					Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	
		Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan				Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	
			Meningkatnya pertumbuhan IKM			Persentase pertumbuhan IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
				Menentukan sektor industri prioritas sesuai potensi daerah		Persentase Pembangunan sentra industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
					Tersusunnya rekomendasi kebutuhan	Jumlah rekomendasi kebutuhan	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
					Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi-Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) dilevel Kabupaten/Kota
					Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
					Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Tertib Administrasi Perizinan Industri			Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
				Meningkatnya fasilitasi Perizinan Pelaku Usaha IKM		Persentase Terbitnya Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	menjadi kewenangan pemerintah pusat	
					Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSSRBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatkan Transparansi dan Akses Informasi Industri			Persentase penyediaan sarana Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini melalui SIINas	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
				Menjamin ketersediaan data industri yang valid, terkini, dan mudah diakses.		Persentase penyediaan database pelaku usaha	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
					Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
					Terantau dan Dievaluasinya	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
		Meningkatkan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran				PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	
			Memfasilitasi pendaftaran perusahaan perdagangan besar, menengah dan kecil			Persentase peningkatan pendaftaran perusahaan perdagangan besar, menengah dan kecil	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
				Terlaksananya Rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang		Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
					Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
				Terlaksananya Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima		Persentase Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Waralaba dari Waralaba		Negeri yang diterbitkan	
					Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik
				Terlaksananya Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		Persentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
					Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
					Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbitnya Dokumen SKA		Persentase dokumen SKA yang diterbitkan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
					Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
			Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD			Persentase Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
				Terwujudnya sarana distribusi yang sesuai standart		Persentase pembangunan sarana distribusi yang sesuai standart	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
					Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
					Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Tercapainya kinerja pengelola sarana distribusi sebagai sumber penerimaan daerah		Persentase pencapaian kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
			Menjaga stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Persentase stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
				Mengurangi potensi kelangkaan barang dan lonjakan harga		Persentase penurunan potensi kelangkaan barang dan lonjakan harga	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
					Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
					Tersedianya Laporan Koordinasi dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
					Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
				Mengurangi fluktuasi harga yang berlebihan		Persentase pengendalian fluktuasi harga yang berlebihan	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
					Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
					Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
					Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi diTingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi diTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi diTingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
					Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
					Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	
			Menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen			Persentase pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan labelisasi.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
				Menjamin kebenaran hasil pengukuran		Persentase alat ukur yang lulus tera/tera ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
					Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
					Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
					Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Penyidikan Metrologi Legal

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatkan kontribusi produk dalam negeri terhadap perekonomian daerah			Persentase peningkatan volume dan nilai penjualan produk dalam negeri di pasar domestik maupun ekspor	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
				Meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk dalam negeri		Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
					Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
					Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Ekspor Barang/ Jasa				Persentase Ekspor Barang dan Jasa (PDRB)	
			Meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah			Persentase Nilai ekspor produk unggulan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
				Mendorong peningkatan potensi ekspor produk unggulan daerah		Persentase peningkatan potensi Produk Ekspor Unggulan	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pameran Dagang Nasional
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang akuntable dan Berbasis Resiko				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance)			Persentase tata kelola pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah		Persentase kualitas dokumen perencanaan daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perubahan RKA-SKPD		
					Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
				Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Terlaksananya Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
					Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Pengamanan aset milik daerah yang dikelola oleh perangkat daerah		Persentase pengamanan aset milik daerah yang dikelola oleh perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
					Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
					Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
					Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Penyediaan sarana prasarana penunjang perangkat daerah		Persentase Penyediaan sarana prasarana penunjang perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pengelolaan tertib administrasi perangkat daerah		Persentase pengelolaan tertib administrasi perangkat daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan sarana dan prasarana barang milik daerah		Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM		100%	100%	2.148.580.000	100%	2.363.438.000	100%	2.599.781.800	100%	2.859.759.980	100%	3.145.735.978	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan sentra industri		100%	100%	2.148.580.000	100%	2.363.438.000	100%	2.599.781.800	100%	2.859.759.980	100%	3.145.735.978	
3	31	2	2.01	0001	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	235.000.000	1 Dokumen	258.500.000	3 Dokumen	284.350.000	3 Dokumen	312.785.000	3 Dokumen	344.063.500
3	31	2	2.01	0002	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000	1 Dokumen	263.538.000	1 Dokumen	289.891.800	1 Dokumen	318.880.980	1 Dokumen	350.769.078
3	31	2	2.01	0003	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	621.000.000	1 Dokumen	683.100.000	1 Dokumen	751.410.000	1 Dokumen	826.551.000	1 Dokumen	909.206.100
3	31	2	2.01	0004	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	220.000.000	3 Dokumen	242.000.000	3 Dokumen	266.200.000	3 Dokumen	292.820.000
3	31	2	2.01	0005	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	242.000.000	4 Dokumen	266.200.000	5 Dokumen	292.820.000	6 Dokumen	322.102.000	7 Dokumen	354.312.200
3	31	2	2.01	0006	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	213.000.000	1 Dokumen	234.300.000	1 Dokumen	257.730.000	1 Dokumen	283.503.000	1 Dokumen	311.853.300
3	31	2	2.01	0007	7	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	98.000.000	1 Rekomendasi	107.800.000	1 Rekomendasi	118.580.000	1 Rekomendasi	130.438.000	1 Rekomendasi	143.481.800

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	31	2	2.01	0008	8	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) dilevel Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi- Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	110.000.000	10 Dokumen	121.000.000	10 Dokumen	133.100.000	10 Dokumen	146.410.000
3	31	2	2.01	0009	9	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	1 Laporan	146.410.000
3	31	2	2.01	0010	10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendasi	110.000.000	1 Rekomendasi	121.000.000	1 Rekomendasi	133.100.000	1 Rekomendasi	146.410.000
3	31	3				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan		100%	100%	320.000.000	100%	352.000.000	100%	387.200.000	100%	425.920.000	100%	468.512.000
3	31	3	2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terbitnya Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	100%	320.000.000	100%	352.000.000	100%	387.200.000	100%	425.920.000	100%	468.512.000
3	31	3	2.01	0003	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	120.000.000	10 Dokumen	132.000.000	15 Dokumen	145.200.000	20 Dokumen	159.720.000	25 Dokumen	175.692.000
3	31	3	2.01	0004	2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSSRBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	242.000.000	1 Dokumen	266.200.000	1 Dokumen	292.820.000

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase penyediaan sarana Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini melalui SIINas		100%	100%	714.000.000	100%	785.400.000	100%	863.940.000	100%	950.334.000	100%	1.045.367.400	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan database pelaku usaha		100%	100%	714.000.000	100%	785.400.000	100%	863.940.000	100%	950.334.000	100%	1.045.367.400	
3	31	4	2.01	0001	1	Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	335.000.000	1 Dokumen	368.500.000	1 Dokumen	405.350.000	1 Dokumen	445.885.000	1 Dokumen	490.473.500
3	31	4	2.01	0002	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	242.000.000	1 Dokumen	266.200.000	1 Dokumen	292.820.000
3	31	4	2.01	0003	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	179.000.000	1 Dokumen	196.900.000	1 Dokumen	216.590.000	1 Dokumen	238.249.000	1 Dokumen	262.073.900
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan pendaftaran perusahaan perdagangan besar, menengah dan kecil		100%	100%	268.000.000	100%	286.800.000	100%	307.480.000	100%	330.228.000	100%	355.250.800	
3	30	2	20.2		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan		100%	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	159.720.000	100%	175.692.000	
3	30	2	20.2	0001	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	132.000.000	1 Dokumen	145.200.000	1 Dokumen	159.720.000	1 Dokumen	175.692.000
3	30	2	20.3		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang diterbitkan													

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG		INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3	30	2	2.03	0001	1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
3	30	2	20.4			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		100%	100%	98.000.000	100%	104.800.000	100%	112.280.000	100%	120.508.000	100%	129.558.800
3	30	2	2.04	0001	1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	68.000.000	1 Laporan	74.800.000	1 Laporan	82.280.000	1 Laporan	90.508.000	1 Laporan	99.558.800
3	30	2	2.04	0002	2	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
3	30	2	20.5			Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase dokumen SKA yang diterbitkan		100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
3	30	2	2.05	0001	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
3	30	2	20.5			Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase dokumen SKA yang diterbitkan		100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD		100%	100%	1.012.000.000	100%	1.283.200.000	100%	1.337.020.000	100%	1.418.722.000	100%	1.503.594.200
3	30	03	20.1			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi yang sesuai standart		100%	100%	750.000.000	100%	1.007.000.000	100%	1.045.200.000	100%	1.109.720.000	100%	1.175.692.000

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG		INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3	30	03	2.01	0001	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	630.000.000	4 unit	875.000.000	5 Unit	900.000.000	6 Unit	950.000.000	7 Unit	1.000.000.000
3	30	03	20.1			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pencapaian kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan		100%	100%	262.000.000	100%	276.200.000	100%	291.820.000	100%	309.002.000	100%	327.902.200
3	30	03	2.01	0001	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	142.000.000	8 Dokumen	156.200.000	8 Dokumen	171.820.000	8 Dokumen	189.002.000	8 Dokumen	207.902.200
3	30	03	2.01	0001	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	120.000.000	8 Dokumen	120.000.000	8 Dokumen	120.000.000	8 Dokumen	120.000.000	8 Dokumen	120.000.000
3	30	4				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		100%	100%	11.275.150.363	100%	11.875.707.881	100%	12.509.973.275	100%	13.179.999.938	100%	13.887.980.735
3	30	4	20.1			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penurunan potensi kelangkaan barang dan lonjakan harga		100%	100%	270.000.000	100%	297.000.000	100%	326.700.000	100%	359.370.000	100%	395.307.000
3	30	04	2.01	0001	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100.000.000	8 Laporan	110.000.000	9 Laporan	121.000.000	11 Laporan	133.100.000	12 Laporan	146.410.000
3	30	04	2.01	0002	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8 laporan	8 laporan	8 laporan	50.000.000	8 Laporan	55.000.000	9 Laporan	60.500.000	11 Laporan	66.550.000	12 Laporan	73.205.000
3	30	04	2.01	0003	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8 laporan	8 laporan	8 laporan	120.000.000	8 Laporan	132.000.000	9 Laporan	145.200.000	11 Laporan	159.720.000	12 Laporan	175.692.000

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG		INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3	30	5	20.1			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian fluktuasi harga yang berlebihan		100%	100%	10.719.150.363	100%	11.264.107.881	100%	11.837.213.275	100%	12.439.963.938	100%	13.073.941.135
3	30	05	2.01	0001	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	130.000.000	25 Laporan	143.000.000	30 Laporan	157.300.000	35 Laporan	173.030.000	40 Laporan	190.333.000
3	30	05	2.01	0002	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	50.000.000	8 laporan	55.000.000	8 laporan	60.500.000	8 laporan	66.550.000	8 laporan	73.205.000
3	30	05	2.01	0003	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	10.539.150.363	11 Laporan	11.066.107.881	11 Laporan	11.619.413.275	11 Laporan	12.200.383.938	11 Laporan	12.810.403.135
3	30	5	20.1			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi diTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi diTingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	286.000.000	100%	314.600.000	100%	346.060.000	100%	380.666.000	100%	418.732.600
3	30	05	2.01	0001	1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	121.000.000	3 Dokumen	133.100.000	4 Dokumen	146.410.000
3	30	05	2.01	0002	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100.000.000	5 Laporan	110.000.000	6 Laporan	121.000.000	7 Laporan	133.100.000	8 Laporan	146.410.000
3	30	05	2.01	0003	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	86.000.000	5 Laporan	94.600.000	6 Laporan	104.060.000	7 Laporan	114.466.000	8 Laporan	125.912.600
3	30	6				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan labelisasi.		100%	100%	625.000.000	100%	667.500.000	100%	714.250.000	100%	765.675.000	100%	841.275.800

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG		INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3	30	6	20.1			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur yang lulus tera/tera ulang		100%	100%	625.000.000	100%	667.500.000	100%	714.250.000	100%	765.675.000	100%	841.275.800
3	30	6	2.01	0001	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2100 Unit	2100 Unit	2100 Unit	200.000.000	2400 Unit	220.000.000	2700 Unit	242.000.000	3000 Unit	266.200.000	3300 Unit	311.853.300
3	30	6	2.01	0002	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang	50 Orang	50 Orang	225.000.000	60 Orang	247.500.000	70 Orang	272.250.000	80 Orang	299.475.000	90 Orang	329.422.500
3	30	6	2.01	0003	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	15 Unit	15 Unit	15 Unit	200.000.000	15 Unit	200.000.000	15 Unit	200.000.000	15 Unit	200.000.000	15 Unit	200.000.000
3	30	7				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan volume dan nilai penjualan produk dalam negeri di pasar domestik maupun ekspor		100%	100%	725.000.000	100%	817.500.000	100%	884.250.000	100%	940.675.000	100%	972.242.500
3	30	7	20.1			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100%	100%	725.000.000	100%	817.500.000	100%	884.250.000	100%	940.675.000	100%	972.242.500
3	30	7	2.01	0001	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	20 UMKM	20 UMKM	425.000.000	25 UMKM	467.500.000	30 UMKM	514.250.000	35 UMKM	565.675.000	40 UMKM	622.242.500
3	30	7	2.01	0002	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM	20 UMKM	20 UMKM	300.000.000	25 UMKM	350.000.000	30 UMKM	370.000.000	35 UMKM	375.000.000	40 UMKM	350.000.000
3	30	8				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai ekspor produk unggulan daerah		100%	100%	590.000.000	100%	649.000.000	100%	713.900.000	100%	785.290.000	100%	863.819.000

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	30	8	20.1			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan potensi Produk Ekspor Unggulan		100%	100%	590.000.000	100%	649.000.000	100%	713.900.000	100%	785.290.000	100%	863.819.000
3	30	8	2.01	0001	1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	210.000.000	10 Pelaku Usaha	231.000.000	12 Pelaku Usaha	254.100.000	14 Pelaku Usaha	279.510.000	16 Pelaku Usaha	307.461.000
3	30	8	2.01	0002	2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	130.000.000	10 Pelaku Usaha	143.000.000	12 Pelaku Usaha	157.300.000	14 Pelaku Usaha	173.030.000	16 Pelaku Usaha	190.333.000
3	30	8	2.01	0003	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	150.000.000	10 Pelaku Usaha	165.000.000	12 Pelaku Usaha	181.500.000	14 Pelaku Usaha	199.650.000	16 Pelaku Usaha	219.615.000
3	30	8	2.01	0004	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk	10 Produk	100.000.000	15 Produk	110.000.000	20 Produk	121.000.000	25 Produk	133.100.000	30 Produk	146.410.000
3	30	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tata kelola pemerintahan daerah		100%	100%	23.099.588.000	100%	24.953.406.800	100%	24.522.607.480	100%	24.588.478.228	100%	24.678.058.221
3	30	1	20.1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas dokumen perencanaan daerah		100%	100%	469.000.000	100%	786.900.000	100%	865.590.000	100%	912.899.000	100%	1.030.988.900
3	30	1	2.01	0001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	125.000.000	3 Dokumen	137.500.000	3 Dokumen	151.250.000	3 Dokumen	166.375.000
3	30	1	2.01	0002	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	137.500.000	1 Dokumen	112.000.000	1 Dokumen	150.000.000
3	30	1	2.01	0003	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	88.000.000	1 Dokumen	96.800.000	1 Dokumen	106.480.000

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG		INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3	30	1	2.01	0004	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	137.500.000	1 Dokumen	151.250.000	1 Dokumen	166.375.000
3	30	1	2.01	0005	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	88.000.000	1 Dokumen	96.800.000	1 Dokumen	106.480.000
3	30	1	2.01	0006	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	89.000.000	6 Laporan	97.900.000	6 Laporan	107.690.000	6 Laporan	118.459.000	6 Laporan	130.304.900
3	30	1	2.01	0007	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	82.500.000	1 Laporan	90.750.000	1 Laporan	99.825.000	1 Laporan	109.807.500
3	30	1	2.01	0008	8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	18.150.000	1 Dokumen	19.965.000	1 Dokumen	21.961.500
3	30	1	2.01	0009	9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	1 Dokumen	73.205.000
3	30	1	20.2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	11.550.000.000	100%	11.495.000.000	100%	11.665.500.000	100%	11.732.050.000	100%	11.788.845.000
3	30	1	2.02	0001	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	65 Orang	65 Orang	11.000.000.000	65 Orang	11.000.000.000	65 Orang	11.000.000.000	65 Orang	11.000.000.000	65 Orang	11.000.000.000
3	30	1	2.02	0002	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	1 Dokumen	73.205.000

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG		INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3	30	1	2.02	0003	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	133.100.000	1 Dokumen	146.410.000
3	30	1	2.02	0004	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	133.100.000	1 Dokumen	146.410.000
3	30	1	2.02	0005	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	133.100.000	1 Dokumen	146.410.000
3	30	1	2.02	0006	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	133.100.000	1 Dokumen	130.000.000
3	30	1	2.02	0007	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	133.100.000	1 Dokumen	146.410.000
3	30	1	20.3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan aset milik daerah yang dikelola oleh perangkat daerah		100%	100%	2.039.600.000	100%	2.074.600.000	100%	2.113.100.000	100%	2.155.450.000	100%	2.202.035.000
3	30	1	2.03	0001	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen	219.615.000
3	30	1	2.03	0002	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.689.600.000	1 Dokumen	1.689.600.000	1 Dokumen	1.689.600.000	1 Dokumen	1.689.600.000	1 Dokumen	1.689.600.000
3	30	1	2.03	0003	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	1 Laporan	146.410.000

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	30	1	2.03	0004	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	1 Laporan	146.410.000
3	30	1	20.4			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	875.000.000	100%	1.182.500.000	100%	890.750.000	100%	899.825.000	100%	859.807.500
3	30	1	2.04	0001	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000	1 Unit	27.500.000	1 Unit	30.250.000	1 Unit	33.275.000	1 Unit	36.602.500
3	30	1	2.04	0002	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	200.000.000	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-
3	30	1	2.04	0003	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
3	30	1	2.04	0004	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	1 Dokumen	73.205.000
3	30	1	2.04	0005	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	62 Orang	62 Orang	62 Orang	400.000.000	62 Orang	400.000.000	62 Orang	400.000.000	62 Orang	400.000.000	62 Orang	400.000.000
3	30	1	2.04	0006	6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	31 Orang	31 Orang	200.000.000	31 Orang	200.000.000	31 Orang	200.000.000	31 Orang	200.000.000	31 Orang	200.000.000
3	30	1	2.04	0007	7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	31 Orang	31 Orang	200.000.000	31 Orang	200.000.000	31 Orang	200.000.000	31 Orang	200.000.000	31 Orang	150.000.000
3	30	1	2.04	0001	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000	1 Unit	27.500.000	1 Unit	30.250.000	1 Unit	33.275.000	1 Unit	36.602.500
3	30	1	20.5			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	2.366.500.000	100%	2.493.250.000	100%	2.632.675.000	100%	2.786.042.500	100%	2.954.746.750

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG		INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3	30	1	2.05	0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	200.000.000	20 Paket	200.000.000	20 Paket	200.000.000	20 Paket	200.000.000	20 Paket	200.000.000
3	30	1	2.05	0002	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	250.000.000	20 Paket	275.000.000	20 Paket	302.500.000	20 Paket	332.750.000	20 Paket	366.025.000
3	30	1	2.05	0003	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000
3	30	1	2.05	0004	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	599.000.000	1 Paket	599.000.000	1 Paket	599.000.000	1 Paket	599.000.000	1 Paket	599.000.000
3	30	1	2.05	0005	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000
3	30	1	2.05	0006	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	67.500.000	1 Dokumen	74.250.000	1 Dokumen	81.675.000	1 Dokumen	89.842.500	1 Dokumen	98.826.750
3	30	1	2.05	0007	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.500.000	1 Paket	66.550.000	1 Paket	73.205.000
3	30	1	2.05	0008	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	990.000.000	1 Laporan	1.089.000.000	1 Laporan	1.197.900.000	1 Laporan	1.317.690.000
3	30	1	2.05	0009	9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
3	30	1	20.6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan sarana prsarana penunjang perangkat daerah		100%	100%	600.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.200.000.000	100%	800.000.000	100%	700.000.000
3	30	1	2.06	0001	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	30	1	2.06	0002	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	300.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000
3	30	1	2.06	0003	3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	-	1 Unit	-
3	30	1	2.06	0004	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	4 Unit	200.000.000	35 Unit	600.000.000	10 Unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000
3	30	1	20.7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan tertib administrasi perangkat daerah		100%	100%	1.220.193.000	100%	1.303.212.300	100%	1.394.533.530	100%	1.494.986.883	100%	1.605.485.571
3	30	1	2.07	0001	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	118.599.000	1 Laporan	130.458.900	1 Laporan	143.504.790	1 Laporan	157.855.269	1 Laporan	173.640.796
3	30	1	2.07	0002	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	711.594.000	1 Laporan	782.753.400	1 Laporan	861.028.740	1 Laporan	947.131.614	1 Laporan	1.041.844.775
3	30	1	2.07	0003	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000
3	30	1	2.07	0004	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	310.000.000
3	30	1	2.07	0001	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	118.599.000	1 Laporan	130.458.900	1 Laporan	143.504.790	1 Laporan	157.855.269	1 Laporan	173.640.796
3	30	1	20.8			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana barang milik daerah		100%	100%	3.979.295.000	100%	3.917.944.500	100%	3.760.458.950	100%	3.807.224.845	100%	3.536.149.500
3	30	1	2.08	0001	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	336.495.000	10 Unit	370.144.500	10 Unit	407.158.950	10 Unit	447.874.845	10 Unit	370.144.500
3	30	1	2.08	0002	2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100.000.000	30 Unit	100.000.000	30 Unit	100.000.000	30 Unit	100.000.000	30 Unit	100.000.000

KODE					NAMA PROG/KEG/SUBKEG		INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					2025	2026		2027		2028		2029		2030	
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3	30	1	2.08	0003	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	50.000.000	15 Unit	55.000.000	15 Unit	60.500.000	15 Unit	66.550.000	15 Unit	73.205.000
3	30	1	2.08	0004	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 unit	8 unit	2.992.800.000	8 unit	2.992.800.000	8 unit	2.992.800.000	8 unit	2.992.800.000	8 unit	2.992.800.000
3	30	1	2.08	0005	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 unit	200.000.000	6 unit	100.000.000	6 unit	100.000.000	6 unit	100.000.000	6 unit	-
3	30	1	2.08	0006	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	-

Tabel 4.4
Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIOTAS	OUTCOME (Sasaran Kinerja) PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
				Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
				Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
				Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
				Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Program Strategis Daerah yang merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis periode 2025–2029 memiliki daya ungkit besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berfungsi sebagai pendorong utama dalam percepatan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan.

Tabel 4.5
Program Strategis Daerah Kabupaten Bengkalis

NO	PROGRAM	URAIAN
1.	Pembangunan Jembatan Bengkalis – Sumatera	Salah satu Program Strategis Nasional dengan daya ungkit Perekonomian yang sangat besar sekaligus menjadi manifestasi kehadiran negara di wilayah perbatasan dengan pertimbangan Kabupaten Bengkalis penghasil migas dan didukung modalitas sumberdaya yang cukup besar seperti: Kawasan Industri Buruk Bakul, Kawasan Produksi Pangan Nasional, potensi migas di Pulau Bengkalis, peluang investasi energi terbarukan serta berada pada jalur perdagangan tersibuk di dunia
2.	Pembangunan Kawasan Industri Buruk Bakul	Kawasan Industri Buruk Bakul antara lain: modalitas lahan Pertanian dan Perkebunan yang luas, letak yang strategis, laut yang dalam, sesuai dengan tata ruang dan sejalan dengan agenda Nasional dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan energi. Skema Pembangunan: Bumd Melalui Badan Pengelola (BP) Dengan Pihak Swasta (Investor)

Sumber : RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029

Untuk pencapaian kinerja dirumuskan tujuan dan sasaran serta indikator sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yaitu:

- 1) Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan dengan indikator Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan;
- 2) Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan dengan indikator Persentase Peningkatan Sektor Industri Pengolahan Manufaktur;
- 3) Meningkatkan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan indikator PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;
- 4) Meningkatkan Ekspor Barang/Jasa dengan indikator Persentase Ekspor Barang dan Jasa (PDRB);
- 5) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang akuntabel dan Berbasis Risiko dengan indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	16,18%	16,42%	16,64%	16,83%	17%	17,14%
2	Persentase Peningkatan Sektor Industri Pengolahan (manufaktur)	%	6,25%	6,88%	7,56%	8,32%	9,15%	10,07%
3	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	%	1,05%	1,16%	1,27%	1,40%	1,54%	1,69%
4	Persentase Ekspor Barang dan Jasa (PDRB)	%	2,06%	2,27%	2,49%	2,74%	3,02%	3,32%
5	Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK merupakan bagian dari Indiktor Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam RPJMD. IKK dalam konteks Renstra Perangkat Daerah adalah tolok ukur keberhasilan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dalam setiap urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Adapun IKK Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pertumbuhan IKM	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyediaan sarana Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini melalui SIINas	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase peningkatan pendaftaran perusahaan perdagangan besar, menengah dan kecil	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD	%	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan labelisasi.	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase peningkatan volume dan nilai penjualan produk dalam negeri di pasar domestik maupun ekspor	%	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Nilai ekspor produk unggulan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase tata kelola pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman operasional selama lima tahun ke depan untuk dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menjadi instrumen yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 harus dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan terukur, serta dilandasi oleh prinsip kolaboratif dan berorientasi pada kinerja. Implementasi Renstra juga memastikan bahwa setiap langkah strategis senantiasa relevan dan tepat sasaran, serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis serta mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Bengkalis

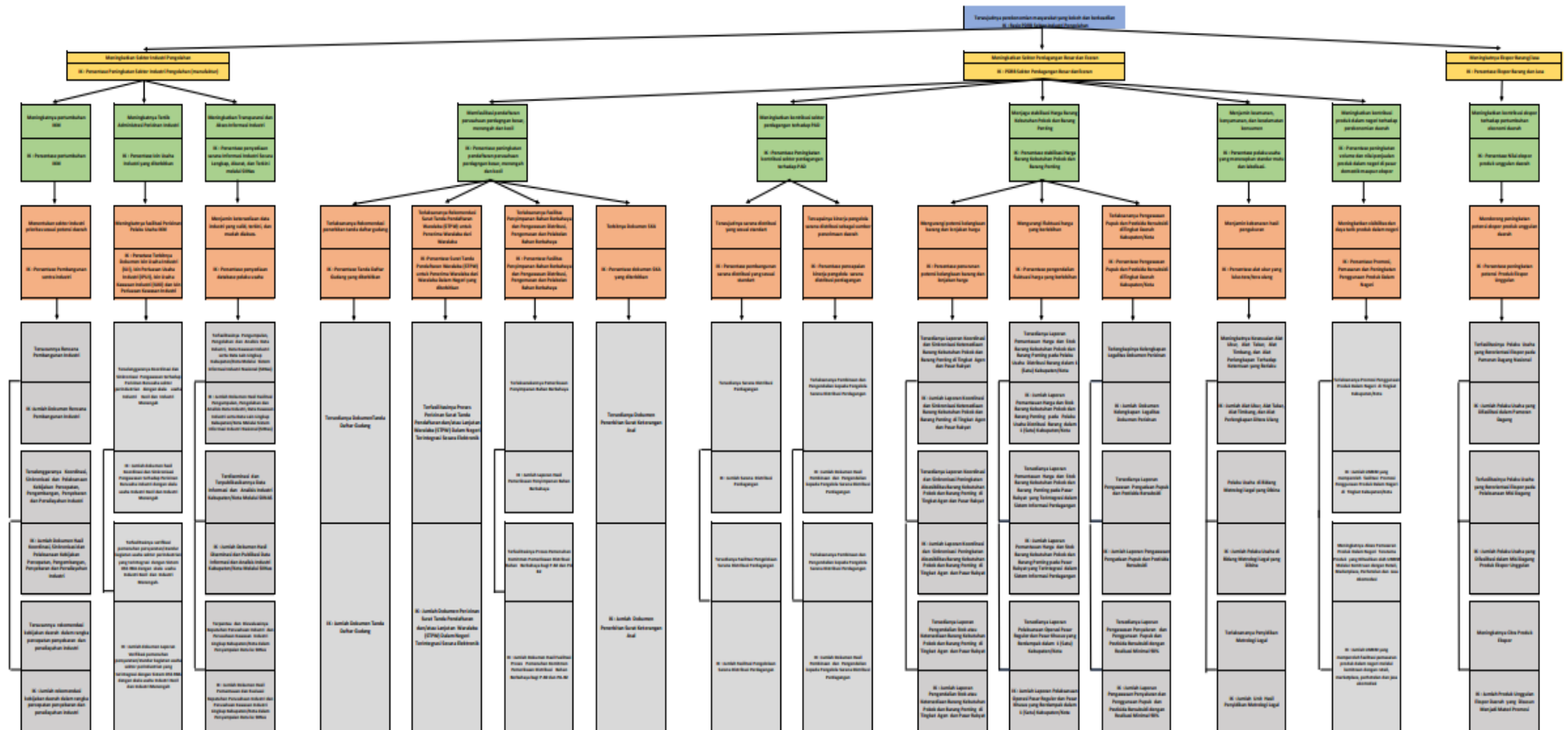


**Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Bengkalis,**

ZULPAN, ST
PEMBINA TK.I
NIP. 19730402 200312 1 002

Lampiran 1 :

POHON KINERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS



Lampiran 2 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 - 2030
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN
1	2	3
1	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan
2	Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Sektor Industri Pengolahan (manufaktur)
3	Meningkatkan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
4	Meningkatnya Ekspor Barang/Jasa	Persentase Ekspor Barang dan Jasa (PDRB)
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
6	Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang akuntabel dan Berbasis Resiko	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah
7	Terwujudnya Pencegahan Korupsi Pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah

Lampiran 3 :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	PDRB Sektor Industri Pengolahan menunjukkan proporsi sumbangan sektor industri pengolahan terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi daerah, yang mencerminkan tingkat industrialisasi dan kekuatan sektor sekunder dalam perekonomian	$\text{Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	BPS
2	Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Sektor Industri Pengolahan (manufaktur)	Peningkatan Sektor Industri Pengolahan menunjukkan tingkat pertumbuhan sektor manufaktur dari tahun ke tahun, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program pengembangan industri pengolahan di daerah	$\text{Persentase Peningkatan Sektor Industri Pengolahan Manufaktur (\%)} = \frac{\text{Industri Pengolahan Manufaktur}_t - \text{Industri Pengolahan Manufaktur}_{t-1}}{\text{Industri Pengolahan Manufaktur}_{t-1}} \times 100\%$	BPS
3	Meningkatkan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran merupakan upaya terencana dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan, daya saing, dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap perekonomian daerah, yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas usaha perdagangan, nilai tambah ekonomi, kapasitas pelaku usaha, serta akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.	$\text{PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran} = \frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran}}{\text{Total PDRB Daerah}} \times 100\%$	BPS
4	Meningkatnya Ekspor Barang/Jasa	Persentase Ekspor Barang dan Jasa (PDRB)	Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) merupakan perbandingan antara nilai ekspor barang dan jasa suatu daerah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam persentase, untuk menggambarkan tingkat kontribusi kegiatan ekspor terhadap perekonomian daerah	$\text{Persentase Ekspor Barang dan Jasa} = \frac{\text{Nilai Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB}} \times 100\%$	BPS